

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Di negara maju, usaha mikro, kecil dan menengah sangat penting, dikarenakan tidak hanya karena sektor usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara berkembang, namun juga pengaruhnya terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar. Di negara berkembang UMKM memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam hal kesempatan kerja dan sumber pemasukan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, serta membantu pembangunan ekonomi pedesaan. Tetapi jika dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nonmigas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di negara sedang berkembang relatif rendah, dan ini sebenarnya adalah perbedaan yang paling terlihat nyata dengan UMKM di negara maju .(Tulus, 2012).

Sriyana (2010) mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah (UMKM) memiliki andil yang besar dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini terlihat dari kinerja UMKM untuk membangkitkan aktivitas ekonomi regional serta

penyediaan lapangan kerja. Akan tetapi, Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) masih memiliki berbagai persoalan mendasar, misalnya soal mutu produk , soal pemasaran dan soal mempertahankan usaha. Dibutuhkan berbagai kebijakan yang ampuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut , terutama untuk menanggulangi berbagai persoalan yang menjadi kendala dalam bidang peningkatan produk dan pemasaran. Diperlukan berbagai kebijakan dari pemerintah untuk membantu UMKM dalam berkembang meliputi perbaikan sarana dan prasarana, akses perbankan dan pembaruan iklim ekonomi yang lebih baik guna membantu dan meningkatkan daya saing serta untuk meningkatkan pangsa pasar. Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkategori Negara berkembang. Daerah-daerah di Indonesia mulai memajukan sektor industri, sehingga memperkecil ketimpangan dengan sektor pertanian. Proses industrialisasi dan pengembangan industri merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti taraf hidup yang lebih maju maupun kualitas hidup yang lebih baik .

Sejarah yang dihadapi oleh industri mikro, kecil, dan menengah selama ini tidak terlepas dari hasil strategi dan sistem yang dibuat oleh pemerintah . Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana produksi, bantuan di bidang manajemen, bantuan finansial serta kemitraan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja. Beragam kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri kecil diharapkan mampu memperbaiki industri mikro, kecil, dan menengah yang mengarah pada industri efisien dengan kualitas produk yang semakin baik, sehingga kelak dapat bersaing

di pasar dalam negeri maupun ekspor dengan nilai tambah yang semakin tinggi untuk memperkuat perekonomian Indonesia (Sujianto, 2005).

Menurut *database* dari Menteri Negara Koperasi dan UKM (Menegkop & UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Tambunan (2012:8), Pada tahun 1997 sekitar 39,7 juta usaha mikro kecil (UMK) memiliki nilai rata-rata penjualan tiap tahunnya kurang lebih Rp 1 Miliar per unit, atau sekitar 99,8 persen dari total unit usaha pada tahun itu. Ketika tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang sedang berada pada titik terburuknya dengan dampak negatif yang sangat besar terhadap beberapa sektor ekonomi di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai skala usaha yang ikut mengalami keterpurukan sehingga mengurangi volume produksi secara drastis. Ketika itu, Menegkop & UKM mengasumsikan ada sekitar 3 juta UMK yang gulung tikar, dan jumlah usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) yang tutup usaha, masing-masing sekitar 12,7 dan 14,2 persen dari jumlah unit masing-masing kelompok.

Tambunan (2012:9) juga menjelaskan bahwa pada tahun 2000, saat perekonomian di Indonesia mulai mengalami perbaikan pasca krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, ada sekitar 39,7 juta UMK, atau sebesar 99,85 persen dari jumlah perusahaan dari jumlah perusahaan berbagai skala di Indonesia. Pada tahun yang sama, ada sekitar 78,8 juta UM, dengan rata-rata nilai penjualan per tahun berkisar lebih dari Rp 1 juta dan kurang dari Rp 50 miliar, atau 0,14 persen dari semua usaha yang ada. Pada tahun 2005, jumlah UMK tercatat sekitar 47 juta, sedangkan jumlah UM mencapai hampir 96 juta unit. Pada tahun 2006, jumlah UMK mencapai sekitar 99,77 persen dari jumlah usaha yang ada di Indonesia,

sedangkan jumlah UM dan UB, masing-masing 0,01 dan 0,22 persen. Namun demikian, laju pertumbuhan unit usaha dari kelompok UM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UMK. Pada tahun 2008, jumlah populasi UMK dan UM (sebut saja UMKM) mencapai sekitar 52,3 jutab unit dan bertambah lagi menjadi 52,7 juta unit pada tahun 2009, atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 52, 769 juta unit usaha.

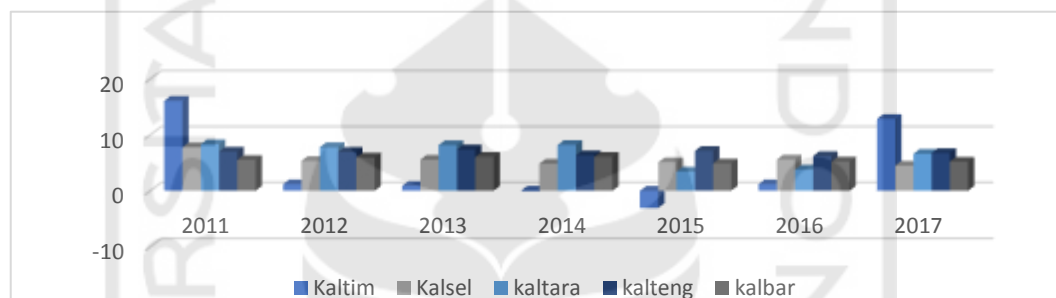
Dilihat dari kesempatan kerja, pada tahun 2006, usaha mikro kecil mampu menyerap tenaga kerja 80.933.384 orang, atau sekitar 91,14 % dari jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sedangkan usaha menengah dan usaha besar, masing-masing memperkerjakan sekitar 4.483.109 dan 3.388.462 orang. Jumlah tenaga kerja di usaha menengah dan usaha besar tersebut masing masing menurun dan meningkat dari 8.754.615 dan 438.198 orang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempekerjakan hampir 91 juta orang jika dibandingkan dengan usaha besar yang hanya mampu menyerap sekitar 2,8 juta tenaga kerja (Tambunan, 2012:10).

Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan yang memiliki potensi kekayaan alam terbanyak. Memiliki luas yang nyaris mencapai setengah kali dari luas pulau Jawa dan Madura. Kalimantan Timur terkenal memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi di bagian Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah di bagian Selatan dan Barat, serta berdekatan dengan

Malaysia Timur (Sabah) , membuat Kalimantan Timur memiliki potensi bisnis daerah yang cukup beragam .

**Gambar 1.1**

**Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2017 (persen)**



*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Grafik 1.1 merupakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Bruto Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2017 atas dasar harga konstant 2010. Provinsi Kalimantan Timur memiliki pertumbuhan ekonomi di atas provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan walaupun selama beberapa terjadi fluktuasi yang sangat besar . Grafik menunjukkan setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tidak selalu di atas Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat, meskipun mengalami penurunan selama beberapa tahun akan tetapi pertumbuhannya pada tahun 2017 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi lain yang ada dipulau Kalimantan . Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan

ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun dari tahun 2012-2016 adalah ketidakstabilan harga komoditas hasil tambang. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2011-2017 tertinggi pada tahun 2011 yaitu 16,04 % dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar -3,09 %

**Tabel 1.1**  
**Distribusi Persentase PDRB Kalimantan Timur Atas Dasar Harga**  
**Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2016 (persen)**

Seri [2010] Lapangan usaha	[Seri 2010] Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha						
	2010 Tahunan	2011 Tahunan	2012 Tahunan	2013 Tahunan	2014 Tahunan	2015 Tahunan	2016 Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,25	5,25	5,47	5,65	7	7,72	8,82
B. Pertambangan dan Penggalian	49,87	56,69	57,11	55,21	50,21	45,03	43,17
C. Industri Pengolahan	24,66	19,46	17,60	17,98	19,32	20,59	20,62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
F. Konstruksi	6,51	5,86	6,34	6,72	7,50	8,29	8,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,36	4,20	4,23	4,29	4,58	5,12	5,53
H. Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,15	2,30	2,58	2,99	3,46	3,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,61	0,57	0,62	0,66	0,73	0,86	0,95
J. Informasi dan Komunikasi	1,01	0,90	0,95	1	1,07	1,20	1,30
K. Jasa Keuangan	1,18	1,07	1,23	1,43	1,50	1,66	1,72
L. Real Estate	0,74	0,66	0,69	0,75	0,84	0,95	0,96
M,N. Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,17	0,18	0,21	0,21	0,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,61	1,53	1,64	1,71	1,94	2,30	2,32
P. Jasa Pendidikan	0,67	0,75	0,87	1,02	1,18	1,44	1,62
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,34	0,37	0,39	0,44	0,55	0,63
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,40	0,35	0,36	0,38	0,43	0,54	0,62
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur*

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling memberi kontribusi dalam fluktuasi PDRB setelah sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak puluhan tahun yang lalu hingga sekarang provinsi Kalimantan Timur selalu mengandalkan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya tak terbarukan. Pada awal sekitar tahun 1970-an sektor kehutanan menjadi sektor unggulan bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur, bahkan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur saat itu mampu mencapai 7,42% per tahun. Pergeseran dasar sektor ekonomi terjadi pada era 90an dimana sektor pertambangan mulai menjadi dasar ekonomi wilayah yang menggantikan sektor kehutanan. Periode 1990-2000, sektor pertambangan, migas dan industri pengilangan minyak bumi dan gas alam cair mulai mengambil alih dominasi ekonomi wilayah Kaltim. Tingkat pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah yakni maksimal sebesar 5,71% per tahun. Di tahun 2000, sektor tambang non migas yakni batubara menggantikan posisi sektor tambang migas. Tetapi saat ini, sektor pertambangan batu bara tidak lagi bisa diunggulkan dalam menopang perekonomian Kalimantan Timur. Hingga akhir 2015, pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni minus 3% lebih rendah dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1.2**  
**Nilai Indeks Pembangunan Manusia 14 Besar Provinsi se-Indonesia**  
**Tahun 2014-2017**

Provinsi	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	78,39	78,99	79,60	80,06
DIY Yogyakarta	76,81	77,59	78,38	79,89
Kalimantan Timur	73,82	74,17	74,59	75,12
Kepulauan Riau	73,40	73,75	73,66	74,45
Bali	73,48	73,27	73,65	74,30
Riau	70,33	70,84	71,20	71,19
Sulawesi Utara	69,96	70,39	71,05	71,66
Banten	69,89	70,27	70,96	71,42
Sumatera Barat	69,39	69,98	70,73	71,24
Sumatera Utara	68,87	69,51	70,00	70,57
Aceh	68,81	69,45	70,00	70,60
Jawa Barat	68,80	68,89	70,05	70,69
Jawa Tengah	68,78	69,49	69,98	70,52
Jawa Timur	68,14	68,95	69,74	70,27
Indonesia	68,90	69,55	70,18	70,81

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai indeks pembangunan manusia tertinggi ke tiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta, serta IPM Provinsi Kalimantan Timur selalu berada diatas IPM nasional . Peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Timur terjadi di seluruh wilayah kota/kabupaten , Kota Samarinda memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 79,93 , sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 66,67 . Secara rinci, IPM di beberapa kabupaten/ kota selain Kota Samarinda ada Kota Bontang sebesar 79,86, yang disusul oleh Kota Balikpapan sebesar 79,83. Selanjutnya ada Kabupaten Berau sebesar 74,01, lalu Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 73,15, disusul Kabupaten Kutai Timur sebesar 72,56, lalu Kabupaten Paser



sebesar 71,61, lalu Kabupaten Penajam Paser Utara 71,13, dan Kutai Barat sebesar 70,69. Semua kota / kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur memiliki IPM yang masuk kategori tinggi

Melihat hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) . Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur bisa dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu jumlah unit UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM, Kredit UMKM, dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 1997-2017. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan uraian di atas dengan judul

**“ Analisis Pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1997-2017 “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh jumlah UMKM terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga UMKM terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur?
3. Bagaimana pengaruh kredit UMKM terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh jumlah UMKM terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur
- b. Untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja UMKM terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur
- c. Untuk menganalisis pengaruh kredit UMKM terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur
- d. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

#### **1.4.1 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi segala pihak:

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang pentingnya UMKM dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan dalam meningkatkan UMKM
- b. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan pustaka mengenai perkembangan UMKM terhadap perekonomian dan bisa dijadikan bahan pertimbangan serta dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Isi dari pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan landasan teori adalah teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Isinya menjelaskan tentang jenis data dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **Bab IV : Hasil dan Analisis**

Terdapat dua sub bab yang pertama adalah deskripsi data penelitian yang isinya berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan sub bab yang kedua adalah hasil serta analisis yang merupakan temuan yang dihasilkan dari penelitian dan analisisnya.

### **Bab V : Kesimpulan dan Implikasi**

Kesimpulan merupakan simpulan dari analisis yang telah dilakukan, sedangkan implikasi adalah hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.